ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PELAYARAN ATAS KELAIKLAUTAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN KAPAL
(Studi kasus Putusan PN Nomor: 317/pid.B/2012/PN.Jkt.Ut)

TESIS

Oleh:

AGUS TRIWIJAYANTO
2302190041

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PELAYARAN ATAS KELAIKLAUTAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN KAPAL
(Studi kasus Putusan PN Nomor: 317/pid.B/2012/PN.Jkt.Ut)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

AGUS TRIWIJAYANTO
2302190041

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Agus Triwijayanto

NIM : 2302190041

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pelayaran Atas Kelaiklautan Dan Kelengkapan Dokumen Kapal (Studi kasus Putusan PN Nomor: 317/pid.B/2012/PN.Jkt.Ut)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yangpernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2026



Agus Triwijayanto

NIM: 2302190041

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PELAYARAN ATAS KELAIKLAUTAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN KAPAL
(Studi kasus Putusan PN Nomor: 317/pid.B/2012/PN.Jkt.Ut)

Oleh :

Nama	: Agus Triwijayanto
NIM	: 2302190041
Program Studi	: Magister Hukum
Peminatan	: Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2026
Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 7252746647130103	NUPTK : 1237749650130140

Ketua Program Studi Magister Hukum,	Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NUPTK : 1237749650130140	NUPTK : 5434757658137093

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 31 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Agus Triwijayanto
NIM : 2302190041
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul : "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pelayaran Atas Kelaiklautan Dan Kelengkapan Dokumen Kapal (Studi kasus Putusan PN Nomor: 317/pid.B/2012/PN.Jkt.Ut)" oleh tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Tomson Situmeang S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Agus Triwijayanto
NIM	: 2302190041
Program Studi	: Magister Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Tugas Akhir	: Tesis
Judul	: Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pelayaran Atas Kelaiklautan Dan Kelengkapan Dokumen Kapal (Studi kasus Putusan PN Nomor: 317/pid.B/2012/PN.Jkt.Ut)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 31 Januari 2026



Agus Triwijayanto
NIM: 2302190041

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus seabagi Dosen Pembimbing tesis pertama dan penguji.
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus dosen pembimbing tesis kedua dan penguji.
6. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku penguji tesis.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungan nya selama penulis melakukan penelitian ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan.

Jakarta, 31 Januari 2026

Penulis

Agus Triwijayanto

NIM: 2302190041

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR……ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING……..iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI……iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI…… v
KATA PENGANTAR……vi
DAFTAR ISI…… vii
ABSTRAK.....ix
ABSTRACT x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian..... 8
D. Kegunaan Penelitian..... 8
E. Kerangka Pemikiran 9
F. Metode Penelitian.....27
G. Orisinalitas Penelitian.....30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 38
A. Hukum Pelayaran 38
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....58
C. Tinjauan Tentang Teori Keadilan 78
D. Surat Persetujuan Berlayar 101

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ELAYARAN TERHADAP KELAIKLAUTAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN SEBELUM BERLAYAR 105
A. Dasar Hukum 105
B. Tanggung Jawab Hukum Nakhoda dan Operator Kapal yang Berlayar tanpa Kelengkapan Dokumen.....107
C. Tanggung Jawab Pidana Bagi Nakhoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar 110
D. Tanggung Jawab Pengusaha Kapal 116

BAB IV PEMENUHAN PRINSIP KEADILAN SUBSTANSIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI SEKTOR PELAYARAN ……....123
A. Prinsip Keadilan Substansif dan Indikatornya 123
B. Analisis Keadilan Substantif dan Prosedural pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara PN 317/Pid.B/2012/PN.Jak.Ut.....130

BAB V PENUTUP..... 138
A. Kesimpulan 138
B. Saran 140

DAFTAR PUSTAKA..... 141

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Parameter Keadilan Substantif dan Prosedural..... 130
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural pada Putusan PN 317/Pid.B/2012/PN.Jak.Ut..... 131
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Keadilan Substantif pada Putusan PN 317/Pid.B/2012/PN.Jak.Ut..... 132

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas menjadikan sektor pelayaran memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan nasional. Pengaturan mengenai keselamatan pelayaran dan tanggung jawab pengangkut, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen kapal dan kelaiklautan, telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta ketentuan internasional seperti *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 yang menekankan perlindungan hak pelaut dan kewajiban operator kapal. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan perbedaan perlakuan antara perusahaan pelayaran dan nakhoda, sebagaimana pada kasus KM. Kurnia I, yang Nakhodanya dinyatakan bersalah atas pelayaran tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kondisi kapal tidak laik laut sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. Penelitian ini menggunakan teori hukum pelayaran serta teori pertanggungjawaban pidana sebagai pisau analisis untuk menilai proporsi tanggung jawab antara operator kapal dan nakhoda, dengan alasan teori tersebut relevan dalam menilai aspek keselamatan pelayaran, tanggung jawab korporasi, dan prinsip keadilan dalam hukum pidana maritim.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta bahan hukum tersier, dan dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian meliputi perusahaan operator KM. Kurnia I, Kantor Administrasi Pelabuhan Muara Angke, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab atas kelaiklautan kapal dan kelengkapan dokumen berlayar pada dasarnya merupakan kewajiban perusahaan pelayaran sebagai pemilik atau operator kapal. Nakhoda tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila berlayar tanpa SPB sesuai Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Putusan PN Jakarta Utara tersebut telah memenuhi unsur keadilan prosedural karena telah menerapkan asas-asas pembuktian dan prosedur peradilan. Namun demikian, secara substansial putusan belum mencerminkan keadilan substantif karena pertimbangan hakim belum menggali doktrin, teori hukum, maupun nilai hukum yang hidup di masyarakat serta belum mempertimbangkan tanggung jawab korporasi sebagai operator kapal. Dengan demikian, ke depan diperlukan penguatan penegakan hukum di sektor pelayaran yang lebih komprehensif dengan memastikan akuntabilitas perusahaan pelayaran secara proporsional demi tercapainya keadilan dan perlindungan bagi seluruh pihak, termasuk nakhoda.

Kata Kunci: pelayaran, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pertanggungjawaban hukum, kelaiklautan kapal, keadilan substantif, nakhoda.

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic state with vast maritime territory, places the shipping sector in a strategic position to support mobility, logistics distribution, and equitable national development. Regulations on maritime safety and carrier responsibilities, including vessel seaworthiness and mandatory documentation, are governed by Law Number 17 of 2008 on Shipping and international standards such as the Maritime Labour Convention (MLC) 2006, which emphasizes the protection of seafarers' rights and the obligation of vessel operators. However, in practice, disparities remain between the legal treatment of shipping companies and ship masters, as illustrated in the KM Kurnia I case, where the ship master was convicted for sailing without a Port Clearance (SPB) and for operating an unseaworthy vessel, as stated in the North Jakarta District Court Decision Number 317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. This research employs shipping law theory and criminal liability theory as analytical frameworks to examine the proportionality of responsibility between vessel operators and ship masters, given their relevance in assessing maritime safety, corporate liability, and fairness in maritime criminal law.

This study adopts a descriptive-analytic method with normative and empirical juridical approaches. Data were collected through literature review of legislation, judicial decisions, legal references, and supporting materials, and analyzed qualitatively. Field observations were conducted at the operating company of km. Kurnia I, the muara angke port administration office, and the north jakarta district court.

The findings show that the responsibility for vessel seaworthiness and documentation lies primarily with the shipping company as the ship operator. Nevertheless, a shipmaster may still be held criminally liable for sailing without an spb in accordance with article 323 of law number 17 of 2008 concerning shipping. The court decision fulfills procedural justice principles, as it adheres to evidentiary and judicial procedures. However, substantively, it does not fully reflect substantive justice, as the judges' considerations did not refer to jurisprudence, legal doctrines, or social values, nor did they take into account corporate liability. Therefore, strengthening law enforcement in the shipping sector is required to ensure proportional corporate accountability and to protect the rights of shipmasters within a fair maritime legal framework.

Keywords: *shipping, Sailing Permit (SPB), legal accountability, vessel seaworthiness, substantive justice, shipmaster.*